



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SETYANTO PUTRO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 511989

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/235 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m2/100 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 122.600.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN CORROLA Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000
3. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
4. MOBIL, MITSHUBISHI JEEP WILLYS Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 42.173.235

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 73.330.815

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.288.104.050

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.288.104.050

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.